

ABSTRACT

Diversity management is always a challenging issue for states like Indonesia whose societies consist of multiple socio cultural and religious identities. Mismanagement of diversity, which should ideally be treated as assets of development, would result in conflicts, intolerance, marginalization, discriminations, exclusions, and persecutions. Indonesia has still been struggling to deal with such socio political phenomena that continue occurring in some areas, up to the present time. This thesis however shows a case of diversity management which is here called “civic pluralism in practice”. It studies ways of relations between the government and people and among the people of Wonosalam, East Java.

Data was collected through not intensively (December 2018- May 2019) half a year and intensively (December 2019) one month fieldwork: participant observations and relevant in-depth interviews and supported with previously long engagement with communities (in their social, cultural and religious activities). Based on research findings, this thesis, using theories of civic pluralism (Bagir 2011, Stokke 2017), argues that 1) Wonosalam whose people are diverse in terms religious identities (Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, and Kepercayaan), ethnic identities (Javanese, Batak, Chinese and Madura), and social class is potentially in conflicts, intolerant, and discrimination, but able to manage themselves because 2) the village governments of Wonosalam, along their various lacks of capacities, have implemented principles of civic pluralism, and 3) the people themselves have also socio culturally engaged themselves in socio cultural and religious relations through which they reproduce ideas and practice of civic pluralism. Ideas of citizenship are practically engaged and reproduced, despite daily challenges, by both the village governments and the people.

Keywords: Civic Pluralism, Citizenship, Equality.

INTISARI

Pengelolaan keragaman selalu menjadi isu yang menarik bagi negara plural seperti Indonesia yang terdiri dari masyarakat dengan latar belakang sosial dan agama yang beragam. Keragaman yang seharusnya menjadi aset penting untuk kemajuan, jika tidak dikelola dengan baik justru berpotensi dalam menyebabkan munculnya konflik, intoleran, marginalisasi, diskriminasi, ekslusi, dan persekusi. Indonesia masih berjuang dalam menghadapi fenomena sosio politik yang terus terjadi di beberapa tempat hingga hari ini. Untuk menjawab hal

tersebut, tesis ini bermaksud untuk menunjukkan pengelolaan keragaman yang disebut sebagai ‘praktek pluralisme kewargaan’. Tesis ini akan mempelajari tentang cara pembentukan relasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antar masyarakat di Wonosalam, Jawa Timur.

Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih setengah tahun secara tidak intensif (Desember 2018-Mei 2019) dan satu bulan secara intensif (Desember 2020) dengan penelitian lapangan: observasi partisipasi, wawancara personal dengan sumber yang relevan dan didukung dengan interaksi jangka panjang dengan penduduk lokal (dalam aktifitas sosial, budaya dan keagamaan mereka). Menurut temuan penelitian yang didapatkan dengan berpedoman pada teori pluralisme kewargaan (Bagir 2011, Stokke 2017), tesis ini berpendapat bahwa: 1) Wonosalam yang terdiri dari masyarakat yang memiliki keragaman dalam identitas agama (Islam, Krsiten, Hindu, Budha, Katolik dan Kepercayaan), identitas etnis (Jawa, Batak, Cina dan Madura), dan juga kelas sosial yang berpotensi mengalami konflik, intolerant, dan diskriminasi, tapi mereka mampu untuk mengelola keragaman tersebut karena 2) jajaran pemerintah desa di Wonosalam dengan keterbatasan kemampuan mereka telah mengamalkan prinsip-prinsip pluralisme kewargaan, dan 3) masyarakat itu sendiri telah mengikat diri mereka dalam hubungan sosial budaya dan keagamaan dengan cara mereka dalam mengolah ide dan mempraktekkan pluralisme kewargaan. Secara praktek, ide-ide tentang kewargaan telah terjalin dan direproduksi, sekalipun banyak tantangan yang harus dihadapi, baik oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Keywords: Pluralisme Kewargaan, Kewargaan, Kesetaraan